

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Paket deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada era 80-an telah mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga perbankan di tanah air. Perkembangan yang sangat pesat ini tidak hanya dalam hal jumlah saja, tetapi juga dalam hal volume usaha serta jasa-jasa yang dihasilkan. Perkembangan ini memberikan dampak yang positif bagi perkembangan sektor finansial dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi negara (Muchdarsyah Sinungan, 1994).

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan definisi bank, sebagai berikut:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Senada dengan hal itu, Muchdarsyah Sinungan (1994) juga menyatakan bahwa bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Dari kedua tinjauan definisi di atas, fungsi lembaga perbankan adalah sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit*

unit). Sebagai sebuah lembaga intermediasi, usaha pokok bank adalah memberikan kredit pada masyarakat. Kredit bagi bank merupakan salah satu sumber pembiayaan yang sangat penting karena memberikan pendapatan bunga yang cukup besar. Pendapatan bunga bersih (*net interest income*) yang diterima oleh bank berasal dari pendapatan bunga total dikurangi dengan biaya bunga.

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank menghadapi risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Mengingat bahwa kredit bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, maka risiko tersebut tidak hanya akan berpengaruh pada keamanan dana masyarakat tersebut tetapi juga akan berpengaruh pada kesehatan bank secara keseluruhan. Untuk itu, bank wajib menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit dalam rangka memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahannya (UU Perbankan No.10 tahun 1998).

Risiko kredit macet merupakan salah satu risiko dari beberapa risiko yang dapat timbul pada pengelolaan bank. Secara umum risiko-risiko yang dapat timbul dalam pengelolaan bank dapat dikelompokkan sebagai berikut (Heru Suprptomo, 1992):

1. Risiko kredit (*credit risk*) yaitu risiko yang mungkin timbul karena kredit tidak dapat dikembalikan pada saat jatuh tempo.
2. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) yaitu risiko yang mungkin timbul karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya tanpa berakibat kerugian pada saat jatuh tempo.

3. Risiko pendapatan (*income risk*) yaitu risiko yang mungkin timbul karena biaya dana melebihi pendapatan dari aset.
4. Risiko pasar (*market risk*) yaitu risiko yang mungkin timbul sebagai akibat penurunan nilai pasar aset yang dimiliki bank.
5. Risiko operasional (*operational risk*) yaitu risiko yang diakibatkan gangguan atau kerusakan sistem kontrol yang ada.
6. Risiko manajemen dan kepemilikan (*ownership and management risk*) yaitu risiko yang mungkin timbul sebagai akibat pengelolaan yang tidak benar ataupun permasalahan dan masalah diantara pemilik bank.

Dalam rangka memperkuat tingkat kesehatan bank sehubungan dengan pemberian kredit serta meminimalisir risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan bank, maka seluruh aktivitas bank harus dikelola secara efektif dan efisien. Upaya tersebut erat kaitannya dengan penerapan serta pelaksanaan pengendalian intern oleh setiap individu dalam bank yang juga menjadi bagian dari pengendalian intern itu sendiri.

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas serta efisiensi operasi (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Pengendalian intern terdiri dari lima unsur pokok yang saling terkait, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian.
2. Penaksiran risiko.

3. Informasi dan komunikasi.
4. Aktivitas pengendalian.
5. Pemantauan (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Untuk mencapai tujuan pengendalian intern khususnya pada prosedur pemberian kredit, terdapat unsur-unsur pengendalian intern yang khusus diterapkan pada prosedur pemberian kredit. Unsur-unsur tersebut adalah personil yang kompeten dan dapat dipercaya, pemisahan tugas yang memadai, prosedur otorisasi yang wajar, dokumen dan catatan yang memadai, pemeriksaan fisik aktiva dan catatan serta pemeriksaan pekerjaan secara independen (Tjukria P. Tawaf, 1999). Apabila seluruh unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan tujuan dari pengendalian intern khususnya pada prosedur pemberian kredit akan dapat tercapai.

Keberadaan pengendalian intern pada sebuah entitas khususnya sebuah bank sangatlah penting baik bagi pihak manajemen maupun auditor independen. Bagi pihak manajemen, semakin luas lingkup dan ukuran bank membuat pihak manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung dan menyeluruh terhadap jalannya operasi bank. Adapun tanggung jawab mengamankan kekayaan bank dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dan ketidakberesan berada di tangan manajemen. Pihak manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan pengendalian intern termasuk pula mengawasi efektivitas pengendalian intern agar dapat melepaskan, menyerahkan atau mendelegasikan wewenang dan tanggung jawabnya dengan tepat (Munawir, 1999).

Namun, dalam merancang dan melaksanakan pengendalian intern manajemen harus memperhatikan adanya keterbatasan yang melekat atau bawaan yang ada pada setiap pengendalian intern. Pengendalian intern hanya akan memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Selain itu, perlu diingat bahwa pengendalian intern berada pada lingkungan usaha yang dinamis bukan statis, sehingga akan mempengaruhi dan memerlukan modifikasi pada pengendalian intern yang ada (Munawir, 1999).

Bagi auditor independen, standar pekerjaan lapangan kedua dalam standar auditing (SPAP, 2001) telah menegaskan bahwa pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Pengendalian intern merupakan salah satu tipe bukti audit yang menjadi alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari kemungkinan kesalahan dan kecurangan. Jika auditor yakin bahwa kliennya memiliki pengendalian intern yang baik maka jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan oleh auditor akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan jika keadaan pengendalian intern kliennya jelek (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Pengendalian intern akan memudahkan auditor dalam melakukan audit dengan keterbatasan waktu dan biaya yang tersedia (Munawir, 1999).

Mengingat pentingnya pengendalian intern serta pelaksanaan standar auditing khususnya standar pekerjaan lapangan kedua, maka auditor perlu menguji efektivitas pengendalian intern yang dijalankan suatu entitas dalam

mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pengujian ini disebut dengan istilah pengujian kepatuhan (*compliance test*) atau sering disebut pengujian pengendalian (*test of control*). Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern serta memperoleh informasi mengenai; (1) frekuensi pelaksanaan pengendalian yang ditetapkan, (2) mutu pelaksanaan aktivitas pengendalian tersebut dan (3) karyawan yang melaksanakan aktivitas pengendalian tersebut (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Dalam melaksanakan pengujian auditor dapat menggunakan bukti-bukti transaksi sebagai alat dalam mengevaluasi adanya ketaatan dan tingkat ketaatan pengendalian dalam pengendalian intern yang diterapkan. Namun, dengan keterbatasan waktu dan biaya yang diberikan oleh klien maka auditor tidak mengumpulkan dan menguji semua bukti untuk merumuskan pendapatnya, melainkan melakukan pengujian (*test*) terhadap karakteristik sebagian bukti untuk membuat kesimpulan mengenai karakteristik seluruh bukti. Dalam melakukan pengujian ada dua metode atau cara yang dapat dilakukan, yaitu *statistical sampling* dan *non statistical sampling*. Dalam *non statistical sampling* terdapat tiga metode atau cara yaitu, mengambil sampel 100%, melaksanakan *judgment sampling* atau melakukan *representative sampling* (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Dalam metode *non statistical sampling*, pengujian pengendalian dapat dilakukan dengan menggunakan sampel 100%. Hal ini sangat sulit dilakukan dan tidak efisien karena auditor harus melakukan pengujian terhadap seluruh bukti

transaksi sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya. Pada pengujian dengan menggunakan *judgment sampling*, auditor memilih anggota sampel dan menganalisa hasil pemeriksaan terhadap sampel berdasarkan pertimbangannya sendiri. Pengujian dengan cara ini hasilnya akan sangat tergantung kepada pertimbangan subyektif auditor dan pengalaman yang dimiliki oleh auditor. Auditor dapat pula menggunakan *representative sampling* dalam pengujiannya yaitu dengan cara memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi. Dengan cara ini setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel, namun evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel tidak dilakukan secara matematis (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998).

Dalam *statistical sampling*, auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisa hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Dengan cara ini pengujian yang dilakukan lebih efisien dan akan menjamin obyektivitas hasil evaluasi (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Boynton, Johnson and Kell (2001) juga menyatakan bahwa penentuan dan pengambilan sampel yang didasarkan pada analisa statistik yang menggunakan hukum probabilitas akan lebih efisien dan menjamin obyektivitas hasil evaluasinya.

Statistical sampling dapat dibagi menjadi dua, yaitu *variable sampling* dan *attribute sampling*. *Variable sampling* digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang tercantum dalam rekening pada pengujian substantive sedangkan *attribute sampling* atau *proportional sampling* digunakan terutama untuk menguji

efektivitas pengendalian intern pada pengujian pengendalian (Mulyadi dan Kanaka Puradiredja, 1998). Penelitian ini didasari oleh pemikiran tentang pentingnya pengujian pengendalian terhadap desain dan / atau operasi kebijakan dan prosedur pengendalian intern bank khususnya pada prosedur pemberian kredit. Selain itu, penggunaan *attribute sampling* akan memudahkan dalam penentuan dan pengambilan sampel yang akan diuji serta menjamin obyektivitas auditor. Untuk itu penulis mengambil judul **“PENGUJIAN PENGENDALIAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MENGGUNAKAN ATTRIBUTE SAMPLING (studi kasus pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Pengujian pengendalian terhadap prosedur pemberian kredit ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengevaluasi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern bank. Efektivitas desain dan operasi pengendalian intern pada prosedur pemberian kredit yang dijalankan oleh bank sangat diperlukan dalam rangka mengamankan aktiva perusahaan, mengurangi risiko terjadinya kredit macet serta tercapainya tujuan pengendalian intern. Selain itu, juga dalam rangka menjaga dan memelihara kualitas kredit tetap baik atau paling tidak bank tidak terjerumus pada kesalahan internalnya yang dapat berakibat pada menurunnya kualitas kredit yang diberikan.

Pengendalian intern juga merupakan alat untuk meletakkan kepercayaan auditor mengenai bebasnya laporan keuangan dari salah saji dan kecurangan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui sejauhmana

pengendalian intern prosedur pemberian kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dijalankan secara efektif?

I.3. Batasan Masalah

Dalam pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern prosedur pemberian kredit, unsur-unsur pengendalian intern yang diuji adalah otorisasi yang wajar terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pemberian kredit dan kelengkapan dokumen-dokumen pendukungnya. Dengan memperhatikan keterbatasan yang dimiliki penulis, pengujian hanya dilakukan pada dokumen-dokumen prosedur pemberian kredit pada periode 1 Januari 2000 – 31 Desember 2000. Dokumen-dokumen yang akan diambil sampelnya adalah:

1. Surat permohonan kredit.
2. Surat perjanjian (akad) kredit.
3. Bukti pengambilan kredit.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian intern prosedur pemberian kredit yang diterapkan dan dijalankan oleh PT. BPR Eka Bumi Artha Metro.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam melakukan pengujian pengendalian intern khususnya pada prosedur pemberian kredit.
- b. Menambah wawasan bagi para pembaca tentang pengujian pengendalian intern khususnya pada prosedur pemberian kredit.
- c. Memberi saran perbaikan kepada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro sebagai pertimbangan dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1. Data yang diperlukan

- a. Data umum.

Data umum merupakan kumpulan atau informasi mengenai keadaan umum PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. Data tersebut meliputi sejarah dan perkembangannya, deskripsi jabatan, prosedur pemberian kredit dan struktur organisasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro.

- b. Data khusus.

Data khusus merupakan data atau informasi yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data tersebut meliputi prosedur pemberian kredit, pengendalian intern prosedur pemberian kredit dan formulir yang digunakan.

1.6.2. Metode pengumpulan data

Dalam upaya menganalisa permasalahan yang dihadapi maka salah satu hal yang sangat penting adalah keakuratan data. Sehubungan dengan itu, maka dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi pustaka

Data yang dikumpulkan berupa data-data berkaitan dengan teori-teori yang relevan dalam penelitian agar diperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai masalah yang diteliti. Landasan diperoleh dari buku-buku literatur, majalah-majalah ilmiah, bulletin-bulletin, artikel-artikel, serta referensi lainya yang relevan.

b. Penelitian lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan mengadakan penelitian secara langsung terhadap obyek yang hendak diteliti. Dalam hal ini obyek yang diteliti adalah prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. Adapun cara yang dilakukan dalam pengumpulan data ini yaitu:

- Interview (wawancara)

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan karyawan yang berwenang dan terkait dengan prosedur pemberian kredit untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan.

- Observasi (pengamatan)

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap suatu hal yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.

- Kuesioner

Pemberian kuesioner yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan pengendalian intern oleh bank.

1.6.3. Metode analisa data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan tertuju pada evaluasi pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro untuk periode 1 Januari 2000 – 31 Desember 2000. Analisa yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Pengujian pengendalian

Analisa ini menekankan pada data-data kuantitatif yang diolah dengan metode statistik. Metode yang digunakan adalah *attribute sampling* model *stop-or-go sampling*. Metode ini digunakan karena penulis berpendapat bahwa pelaksanaan pengendalian intern prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro sudah baik, selain itu agar penulis tidak terlalu banyak melakukan pengambilan sampel. Tahap analisa yang dilakukan adalah:

1. Menentukan *attribute* yang akan diperiksa untuk menguji efektivitas pengendalian intern. *Attribute* adalah suatu

karateristik dari suatu pengendalian. *Attribute* digunakan untuk memeriksa ada tidaknya atau penyimpangan unsur-unsur pengendalian intern yang sebenarnya. *Attribute-attribute* yang diperiksa dalam prosedur pemberian kredit adalah:

- a. Tandatangan pihak berwenang surat permohonan kredit.
 - b. Dokumen pendukung pada surat permohonan kredit berupa fotokopi KTP pemohon dan sertifikat hak milik jaminan.
 - c. Tandatangan pihak berwenang pada surat perjanjian (akad) kredit.
 - d. Dokumen pendukung pada surat perjanjian (akad) kredit berupa hasil analisa kredit.
 - e. Tandatangan pihak berwenang pada bukti pengambilan kredit.
 - f. Dokumen pendukung pada bukti pengambilan pinjaman berupa surat persetujuan permohonan kredit.
2. Menentukan populasi yang akan diambil sampelnya untuk dilakukan pengujian.
 3. Menentukan *desired upper precision limit* (DUPL) dan *reliability level*.
 4. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil.

5. Pemilihan anggota sampel dari seluruh populasi. Agar setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel, maka digunakan tabel angka acak untuk memilih anggota sampel.
6. Buat tabel *stop-or-go decision*.
7. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel.

I. 7. Sistematika Penulisan

Pembahasan disajikan dalam lima bab secara berurutan dan masing-masing bab berkaitan satu dengan yang lain. Uraian singkat dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pendahuluan memuat gambaran secara keseluruhan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini memberikan dasar-dasar atau landasan teoritis tentang pengendalian intern dan *attribute sampling* dalam pengujian pengendalian.

Bab III: Gambaran Umum Perusahaan

Disini akan diuraikan data-data perusahaan meliputi sejarah singkat dan perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan deskripsi jabatan,

prosedur pemberian kredit serta dokumen-dokumen yang terkait dalam prosedur pemberian kredit di PT. BPR Eka Bumi Artha Metro.

Bab IV: Analisa Data

Pada bab ini diuraikan pengujian pengendalian pada prosedur pemberian kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Eka Bumi Artha Metro menggunakan *attribute sampling* model *stop-or-go sampling*.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dan pokok-pokok hasil analisa serta saran-saran yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh manajemen sehubungan dengan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern khususnya pada prosedur pemberian kredit.